



► KEBIJAKAN PUBLIK

Masyarakat Didorong Mengawasi Proyek Pemerintah

UMBULHARJO—Kelompok masyarakat sipil perlu diperkuat konsolidasinya karena dinilai memiliki peran penting dalam mengawasi sejumlah proyek pemerintah agar tidak diselewengkan. Sejumlah bentuk penyimpangan proyek terbukti nyata terjadi di DIY dengan adanya operasi tangkap tangan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dibahas dalam diskusi terkait dengan kebijakan publik di kawasan Jetis, Kota Jogja, Selasa (5/7). Pengasuh Pongpes Sunan Kalijaga Beny Susanto menyatakan dalam berbagai riset sudah banyak membuktikan dalam penyimpangan korupsi sekitar 60% hingga 70% terjadi pada pengadaan barang dan jasa.

Pos ini sangat rawan untuk diselewengkan untuk kepentingan pribadi kelompok tertentu. Masyarakat memiliki peran penting melakukan pengawasan.

"Sisi lain ada fakta bahwa kekuatan masyarakat sipil saat ini justru melemah konsolidasinya. Media sebagai pilar demokrasi sudah banyak menyampaikan, ORI misalnya sudah banyak memberikan rekomendasi sehingga lembaga terkait tidak menuntaskan, tetapi sering kali tidak ditindaklanjuti. Maka masyarakat sipil ini harus meningkatkan kekuatan konsolidasinya," kata Wakil Katib Syuriah PWNUI DIY ini dalam diskusi tersebut, Selasa.

Anggota Fraksi PDIP Kota Jogja Antonius Fokki Ardianto menyatakan kesepakatnya terkait pengawasan proyek pemerintah harus melibatkan banyak pihak terutama masyarakat, la menilai semua legislatif di DIY tentu sudah menjalankan perannya menjalankan fungsi pengawasan.

Selain itu dari sisi regulasi semua sudah berujung pada upaya kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan di Kota Jogja, untuk pembangunan apartemen sekitar 20% dari total lahan yang digunakan harus memberikan ruang manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tetapi ini kadang tidak konsisten dilaksanakan, seperti hanya cukup membuat surat kesepakatan saja bahwa ketika akan membangun siap memberikan ruang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi dalam praktiknya tidak terealisasi. Kami sepakat hal-hal seperti ini harus diawasi bersama masyarakat," ujarnya.

(Sunarti)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005